

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arenawati, 2013, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Arifin Tahir. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung, Alfabeta.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 2003, *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.
- Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria, 2014, *Desa Kuat, Indonesia Hebat!*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia.
- Depdiknas RI, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Hamzah Halim, Kemal Renindo Syahrul Putra, 2009, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis disertai Manual)*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Hendra Karianga, 2011, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bandung, PT Alumni.
- Husni Thamrin, 2013, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- L. Misbah Hidayat, 2007. *Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Mahendra Putra Kurnia *et al*, 2007, *Partisipasi dalam Pembangunan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Maria Eni Surasih, 2006, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Jakarta, Erlangga.
- Mashuri Maschab, 2013, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta, POLGOV UGM.
- Muhammad Djumhana, 2007, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang, Setara Press.
- Pheni Chalid, 2005, *Keuangan Daerah Investasi, dan Desentralisasi Tantangan dan Hambatan*, Jakarta, Kemitraan untuk Tata Pemerintahan yang Baik.
- _____, 2005, *Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*, Jakarta, Kemitraan.
- Riant Nugroho Dwijowijoto, 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Media Komputindo
- Sultan Hamengkubuwono X, 2007, *Merajut Kembali ke Indonesia Kita*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Sutoro Eko, 2015, *Regulasi Baru, Desa Baru*, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- _____ *et al.*, 2016, *Dana Desa untuk Desa Membangun Desa*, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- W. Riawan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, PT Grasindo.
- Yunus Husein *et al.*, 2008. *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*. Jakarta. Komite Nasional Kebijakan Governance.

Jurnal

- Amirrudin, Muhammadiyah, Ruskin Azikin, "Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Beanja Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur", *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, (April, 2012).
- Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo, "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 9, (November, 2015).
- Fauzi Budi Setiawan, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Poros Desa di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik", *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Volume 3, (September, 2012).
- Hasniati, "Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Volume 1, (Juni, 2016).

- Iqsan, "Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, (Februari, 2016).
- Ray Septianis Kartika, Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, *Jurnal Bina Praja*, Volume 3, (September, 2012).
- Sahdila Rahayu, "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar", *Jom FISIP*, Volume 1, (Februari, 2015).
- Suwandi, "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara", *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 4, (Agustus, 2017).
- Syahrul Syamsi, "Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 1, (Januari, 2015).
- Tifani Ardilah, Mochamad Makmur, Imam Hanafi, "Upaya Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 1, (Februari, 2014).
- Zamzam Rizky Faizal Dio, "Kajian Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume 2, (Mei, 2015).
- Zulfan Nahrudin, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 2, (Oktober, 2014).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2016

Internet

Dupla KS, Tiap Desa Dapat Anggaran Rp 1 Miliar di 2017, 11 November 2017, <http://nasional.kontan.co.id/news/tiap-desa-dapat-anggaran-rp-1-miliar-di-2017>, (19.31).

Faieq Hidayat, KPK Soroti 4 Kelemahan Dana Desa yang Buka Peluang Korupsi, 11 November 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3584184/kpk-soroti-4-kelemahan-dana-des-a-yang-buka-peluang-korupsi>, (19.56).

Muhtar, Kebijakan dan Anggaran Dana Desa dalam RAPBN Tahun 2016, 11 November 2017, <http://www.masawah.desa.id/2015/08/kebijakan-dan-anggaran-dana-des-a-dalam.html>, (18.58).

Panji Prayitno, 4 Syarat Agar Dana Desa 2018 Bisa Cair, Apa Saja?, 28 November 2017, <http://regional.liputan6.com/read/2935910/4-syarat-agar-dana-desa-2018-bisa-cair-apa-saja>, (00.18).

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari APBN, 16 November 2017, <http://kendari.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/01/Dana-Desa.pdf>, (19.07).

Yulida Medistiara, ICW Sebut Pak Kades Paling Banyak Korupsi Dana Desa, 11 November 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa>, (19.51)